

ABSTRAK

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika membuat masyarakat umum merasakan dampaknya, penyalahgunaan narkotika dari beberapa kalangan tidak membuat mereka surut untuk melepaskan diri dari barang terlarang tersebut. Beberapa faktor membuat narkotika menjadi barang yang dicari, dari faktor sosial hingga faktor keluarga. Narkotika sudah masuk di beberapa wilayah hingga dari beberapa artikel menyebutkan tidak ada satu wilayah yang bersih pengguna narkotika. Terdapat dalam tatanan daerah provinsi terdapat instansi BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah bagaimana instansi tersebut membentengi daerah dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Tidak lantas hanya upaya preventif perlu juga dikaji bagaimana hambatan dan solusi yang ditawarkan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Terhadap penelitian ini penulis mengambil study kasus di Instansi BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah. Dalam hasil penelitian upaya preventif yang dilakukan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah yaitu dengan melaksanakan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau biasa disingkat dengan P4GN. Pelaksanaan program tersebut mencangkup 4 (empat) pilar yaitu (pilar pencegahan, pilar pemberantasan, pilar rehabilitasi dan pilar pemberdayaan masyarakat) dari 4 (empat) pilar tersebut dapat dihasilkan relawan-relawan dari masyarakat untuk ikut terjun di masyarakat dan dapat mendirikan rumah rehabilitasi mandiri. Kemudian hambatan serta solusi yang dihadapi ialah kurangnya instansi BNN tingkat Kabupaten maka perlunya untuk menambah SDM agar jalur koordinasi antara BNN Provinsi dan BNN Kabupaten dapat berjalan dengan baik, kurang optimal sinergitas antar pemerintah daerah Kegiatan penyuluhan dalam penanggulangan narkotika harus ada sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan minimnya masyarakat untuk melapor secara sukarela, ketakutan masyarakat umum untuk melaporkan kegiatan yang menyimpang merupakan tugas BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah untuk turun memberikan sosialisasi langsung terhadap masyarakat karena masyarakat mendapatkan perlindungan hukum.

Sehingga, penulis membuat sebuah kebijakan untuk mendukung Sumber Daya Manusia BNNP Jawa Tengah dengan membentuk Spionasse yang dibentuk dari kalangan mahasiswa guna memata-mata lingkungan sekitar kemudian Spionasse tersebut bisa turun ke lini masyarakat dengan membentuk Satgas (Satuan Tugas) yang terdiri dari RT, RW maupun masyarakat.

Kata Kunci: BNN, Narkotika, Pencegahan, Penganggulangan, Tindak Pidana

ABSTRACT

Increased narcotics abuse makes the general public feel the impact, narcotics abuse from some circles does not make them recede to escape from the prohibited goods. Several factors make narcotics a sought after item, from social factors to family factors. Narcotics have entered in several regions, so from several articles there is no region that is clean of narcotics users. There is in the provincial regional order there is a National Narcotics Agency (BNNP) of Central Java, how the agency fortifies the region in preventing and overcoming narcotics crime. Not necessarily just preventive measures need to also be examined how the obstacles and solutions offered by BNNP (Provincial National Narcotics Agency) of Central Java.

This research uses a normative juridical approach, that is, legal research carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search of regulations and literature relating to the problem under study. For this research, the writer took a case study at the National Narcotics Agency of the Central Java Province. In the results of research on preventive efforts conducted by the National Narcotics Agency (BNNP) of Central Java, namely by carrying out programs of prevention, eradication, abuse and illicit trafficking of narcotics or commonly abbreviated with P4GN. The implementation of the program includes 4 (four) pillars, namely (prevention pillar, eradication pillar, rehabilitation pillar and community empowerment pillar) out of 4 (four) pillars can be produced by volunteers from the community to participate in the community and can build an independent rehabilitation house. Then the obstacles and solutions faced are the lack of district level BNN agencies, the need to add human resources so that the coordination path between the provincial BNN and the district BNN can run well, less optimal synergy between local governments. Extension activities in narcotics prevention must have synergy with the Regional Government and the lack of the public to report voluntarily, the fear of the general public to report deviant activities is the task of the National Narcotics Agency (BNNP) of Central Java to step down to provide direct socialization to the community because the community gets legal protection.

So the authors make a policy for support BNNP Central Java Human Resources by forming espionage was formed from students to spy on the environment around then the spionasse can go down to the community line with from the task force which is the best and RT, RW as well as the community.

Keywords: BNN, Narcotics, Prevention, countermeasures, Criminal act